Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 29110-29115

Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal Di Desa Dungingis Kecamatan Dakopemean Kabupaten Tolitoli

Maskur[1], Nurhalisa[2], Fatimah[3]

(1) Ekonomi Pembangunan, Universitas Madako Tolitoli

(2) Ekonomi Pembangunan, Universitas Madako Tolitoli

(3) Ekonomi Pembangunan, Universitas Madako Tolitoli

Corresponding Author: Maskur, e-mail: maskurmahmud5@gmail.com

Published : October, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal. Sedangkan untuk sumber data terdiri dari data primer dan skunder. Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukan pemerintah desa berperan aktif dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui pelatihan, bantuan sarana, pengembangan UMKM, infrastruktur, pemasaran produk lokal, akses pembiayaan, dan pembentukan BUMDes. Transparansi dana desa diupayakan melalui berbagai media dan pengawasan. Namun, masih terdapat tantangan dalam pemerataan manfaat dan pelibatan Masyarakat.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembangunan Ekonomi Lokal

ABSTRACT

This study aims to determine the Role of Government in Encouraging Local Economic Development, the method used in this study uses a qualitative descriptive analysis approach to determine how the Role of Government in encouraging local economic development. While the data sources consist of primary and secondary data. To collect data is done by interview, observation, and documentation. The results of this study show that the Village Government plays an active role in encouraging community economic development through training, assistance with facilities, development of MSMEs, infrastructure, marketing of local products, access to financing, and the formation of BUMDes. Transparency of village funds is attempted through various media and supervision. However, there are still challenges in the distribution of benefits and community involvement.

Keyword: Role of Government, Local Economic Development

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemerintah berperan sebagai pihak pengatur yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Bertanggung jawab dalam menetapkan pilihan atau peraturan, terkait regulasi (Ryass, Rasyid, 2010) pemerintah memiliki fungsi untuk membimbing masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan. Meskipun memberikan kerangka kerja konseptual, seringkali gagal menjawab persoalan nyata di tingkat desa seperti di Desa Dungingis karena kurangnya penyesuaian terhadap konteks lokal, budaya, sumberdaya, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di tingkat desa membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi dan karakteristik spesifik desa tersebut.

Tanggung jawab tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa, pada pasal 26 disebutkan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menyelanggarakan pemerintah desa melaksanakan pembangunan ditingkat desa,

pembinaan masyarakat desa, serta penguatan kapasitas masyarakat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 1, merupakan suatu komunitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berhak mengatur kepentingan masyarakat di wilayahnya, berdasarkan asal-usulnya.

Pemerintah Desa Dungingis Kecamatan Dakopemean Kabupaten Tolitoli dapat melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut: 1). Penguatan Kelembagaan Desa dengan meningkatkan kapasitas perangkat desa dan lembaga desa terkait agar mampu merancang dan melaksanakan program pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 2). Pengembangan Potensi Lokal melalui mengidentifikasi potensi ekonomi desa seperti pertanian, perkebunan, kerajinan tangan, dan pariwisata, serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 3). Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi dengan mengintegrasikan teknologi digital untuk pemasaran produk dan promosi desa agar lebih dikenal secara luas.

Pada pemerintahan desa, kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pedesaan yang didukung oleh atau perangkat desa. Oleh karena pemerintah ditingkat desa, perlu memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara logis dalam pengambilan keputusan ditengah masyarakat. Selain itu, mereka juga harus berperan sebagai pihak yang menyampaikan laporan sedang dalam tahap konstruksi. Serta (Rivai, Veithzal., 2006) mengungkapkan bahwa. Menyatakan bahwa peran dapat diartikan sebagai suatu suatu bentuk yang dilakukan, telah ditetapkan serta dibutuhkan dari individu tertentu berdasarkan posisinya. Keberhasilan pembangunan ekonomi di desa Dungingis memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif, serta penyesuaian teori dengan realitas dan karakteristik lokal, daripada hanya mengandalkan teori pembangunan yang bersifat umum dan abstrak.

Oleh sebab itu seorang pemimpin harus mampu melaksanakan perannya dengan baik, karena keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan sangat dikendalikan oleh peranan yang dimainkan oleh aparatur pemerintah desa.

Pemerintah desa memegang peran strategis dalam menggerakan roda pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Melalui berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa juga berusaha menggali potensi ekonomi yang di desa. Perspektif pembangunan desa Dungingis berkelanjutan menekankan pentingnya pengembangan ekonomi lokal yang bertanggung jawab terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ekonomi, pemerintah desa mendorong peningkatan produktivitas dan kewirausahaan warga melalui pelatihan dan pemberdayaan usaha kecil menengah. Dari sisi sosial, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dari aspek lingkungan, upaya dilakukan dengan menjaga kelestarian sumber daya alam dan menerapkan praktik ramah lingkungan. Pemerintah desa Dungingis berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan demi kemakmuran masyarakat.

Pembangunan ekonomi lokal menjadi salah satu elemen kunci dalam usaha untuk memperbaiki. Kesejateraan masyarakat, terutama dikawasan pedesaan yang sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di Desa Dungingis. Desa Dungingis memiliki potensi besar untuk berkembang secara ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kearifan lokal yang dimiliki, namun pengelolaan potensi tersebut membutuhkan peran dalam menggerakan dan memfasilitaskan pembangunan ekonomi lokal.

Pemerintah Desa Dongingis berupaya mendorong pembangunan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kearifan lokal desa. Sumber daya alam di desa ini meliputi lahan pertanian yang subur, Perkebunan yang luas, dan sumber air melimpa yang mendukung kegiatan agribisnis. Sumber daya manusia desa yang aktif dan terampil menjadi modal utama dalam pengembangan usaha ekonomi lokal. Kearifan lokal, seperti tradisi dan budaya setempat, dijadikan dasar dalam pengembangan produk dan wisata desa, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menguatkan identitas desa. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui pembangunan ekonomi berbasis lokal.

Menurut Azam Awang (2010), pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan pada tingkat paling rendah dalam pemerintahan dalam negara yang berbentuk kesatuan Rebulik Indonesia. Pemerintah desa memiliki tugas dan fungsi yang selaras dengan kebutuhan kelompok orang yang mereka layani. Hal ini Mengindikasikan bahwa suatu desa berperan sebagai bagian dari sistem

pemerintahan, memiliki tanggungjawab utama untuk melayani kepentingan masyarakat yang berada dibawah kewenangannya. Dalam konteks ini peran pemerintah desa adalah mendorong masyarakat agar dapat menjadi bagian dari kekuatan utama sedang dalam tahap pengembangan. Peran strategis dalam menciptakan Sistem lingkungan yang mendukung perkembangan" sektor ini. Melalui kebijakan yang mendukung, penyelenggaraan pelatihan, pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan kapasitas komunitas, pemerintah ditingkat desa dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian lokal Fajarwati, A., Cikusin, Y., & Putra, L. R., (2024).

Pemerintah desa memegang peran strategis dalam menggerakan roda pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Melalui berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa juga berusaha menggali potensi ekonomi yang di desa. Pembangunan ekonomi lokal menjadi salah satu elemen kunci dalam usaha untuk memperbaiki. Kesejateraan masyarakat, terutama dikawasan pedesaan yang sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di Desa Dungingis. Memiliki potensi besar untuk berkembang secara ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kearifan lokal yang dimiliki, namun pengelolaan potensi tersebut membutuhkan peran dalam menggerakan dan memfasilitaskan pembangunan ekonomi lokal.

Peran pemerintah desa sangat penting mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di desa dungingis masih mengalami kendala yaitu salah satunya adalah tidak optimal dana desa melihat Desa Dungingis wilayahnya sangat kecil, karena jumlah dana yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan yang telah direncanakan, meskipun setiap anggaran, termasuk dana desa, telah ditentukan berdasarkan aturan dan alokasi tertentu, dalam praktiknya, kebutuhan di lapangan sering kali melebihi jumlah dana yang tersedia. Kebijakan alokasi, transparansi, dan prioritas penggunaan dana desa bertujuan memastikan dana disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat, memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pengelolaan dana desa di Desa Dungingis menunjukkan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi lokal melalui transparansi dan partisipasi masyarakat. Meski demikian, efektivitas pengelolaan dana masih perlu ditingkatkan agar sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Upaya desa meliputi partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan dana, serta peningkatan kapasitas aparatur desa, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kurangnya inovasi dalam mengembangkan potensi ekonomi desa, yang dimaksud dalam kurangnya inovasi berarti masyarakat cenderung tidak memiliki ide-ide yang baru atau kemampuan untuk berpikir kreatif dalam menciptakan sesuatu yang berbeda. Kurangnya inovasi dalam mengembangkan potensi ekonomi desa disebabkan oleh minimnya sumber daya, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, serta kurangnya dukungan dan inovasi dari pemerintah desa. Upaya pemerintah desa Dungingis dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal meliputi peningkatan pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan potensi lokal secara berkelanjutan.

Meraka kurang berani untuk mencoba hal-hal baru dalam memulai usaha, sehingga hanya meniru apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, khususnya tetangga mereka. Akibatnya, usaha yang dijalankan menjadi seragam dan tidak ada nilai unik yang membedakan dari usaha lain. Belum bisa menciptakan terobosan atau gagasan yang baru dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, hal ini membuat pengelolaan sumber daya dan potensi yang belum optimal.

Selain itu secara eksternal, Desa Dungingis juga menghadapi tantangan dalam mengakses pasar di luar wilayahnya. Keterbatasan jaringan pemasaran menjadi hambatan besar bagi pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk-produk ke pasar yang lebih luas, seperti jagung, kelapa, dll, dan hasil panen lainnya seperti beras, sulit mencapai pasar yang lebih luas. Kondisi ini menunjukan perlunya perhatian serius dari berbagai pihak untuk mendorong pengembangan inovasi dan memperkuat akses pemasaran agar pembangunan ekonomi lokal di Desa Dungingis dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah juga juga berperan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi seperti penyedian permodalan.

Penyebab utama kesulitan masyarakat Desa Dungingis dalam menjual hasil panen ke pasar yang lebih luas meliputi kurangnya akses terhadap jalur transportasi yang memadai, minimnya pengetahuan tentang pemasaran dan penetapan harga, serta terbatasnya infrastruktur penunjang seperti tempat penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian. Selain itu, terbatasnya informasi tentang pasar dan

peluang penjualan juga menjadi hambatan. Upaya pemerintah desa dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal meliputi peningkatan infrastruktur, pelatihan pemasaran, dan penguatan koperasi serta kelembagaan ekonomi desa, agar hasil pertanian dapat lebih mudah dan luas dipasarkan serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang ini, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran pemerintah desa dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal di Desa Dungingis.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Dungingis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli. Adapun menghitung durasi penelitian dari dimulainya perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Desember sampai dengan Mei 2025.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini teknik penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang digunakan untuk menentukan siapa informan yang akan dipilih nantinya (Sugiyono, 2019:289).

3. Informan Penelitian

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan (Afrizal, 2019). Adapun Kriteria dalam menentukan informan penelitian yaitu, pemerintah desa, Pelaku UMKM, Petani, Nelayan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Dungingis, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Pelaku UMKM, Petani, dan Nelayan. Berdasarkan sumbernya terdapat dua data yaitu data primer dan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemerintah desa memainkan Berperan penting dalam kemajuan industri perikanan.antaranya dengan membangun fasilitas tempat berlabuh kapal.untuk nelayan dan memberikan penyaluran bibit ikan kerapu Hardinata, D., & Mesra, R, (2024).

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan dengan bantuan orang lain. Alat dokumentasi penting untuk membantu melakukan wawancara mendalam, seperti pedoman wawancara mendalam, alat perekam suara, dan catatan lapangan (Moleong 2021). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah desa dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal di Desa Dungingis. Penulis memilih 4 peran pemerintah untuk melihat bagaimana peran pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai pembuat kebijakan atau keputusan terkait aturan (Ryass, Rasyid, 2010), yaitu peran sebagai fasilitator, motivator, regulator, komunikator. Hasil pembahasan yaitu sebagai berikut:

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah desa menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat melalui berbagai cara, seperti alokasi dana desa untuk usaha yang memiliki prospek serta memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha dan perusahaan dalam promosi produk lokal. Kegiatan sosialisasi dan pelibatan UMKM dalam berbagai acara desa juga menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, masyarakat masih mengharapkan peran yang lebih maksimal dari pemerintah desa, khususnya dalam hal pemberian modal usaha, akses ke lembaga keuangan, dan perluasan pasar hingga luar daerah. Pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan perlu diimbangi dengan dukungan keberlanjutan agar pelaku UMKM dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Upaya pengembangan UMKM dan ketahanan pangan ini adalah bahwa melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian akses pembiayaan, UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan,

memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal. Program ketahanan pangan yang dioptimalkan akan mendukung ketahanan ekonomi desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya alam serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar.

Pemerintah desa memegang peranan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan penyediaan air bersih, yang akan mendukung aktivitas ekonomi dan pertanian. Upaya lain melalui pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) dan kerja sama dengan pemerintah serta sektor swasta diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Peran Pemerintah Sebagai Motivator

Bahwa masyarakat desa telah memperoleh berbagai bentuk pelatihan dari pemerintah desa, khususnya di bidang kewirausahaan, pertanian, dan pemasaran. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan komunitas.

Namun demikian, pendampingan yang dilakukan masih dirasakan belum merata. Beberapa warga menyatakan bahwa pendampingan hanya berupa sosialisasi tanpa tindak lanjut yang mendalam. Oleh karena itu, meskipun program pelatihan dan keterampilan telah memberikan dampak positif seperti peningkatan produktivitas dan pembukaan lapangan kerja, tetap diperlukan penguatan, pemerataan, dan kesinambungan program agar manfaatnya lebih luas dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

Peran Pemerintah Sebagai Komunikator

Bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin transparansi dalam pengelolaan dana desa dan program pembangunan. Langkah-langkah seperti pertemuan rutin dengan masyarakat, publikasi informasi melalui papan pengumuman, serta pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas menjadi bagian penting dalam menciptakan akuntabilitas dan keterbukaan kepada warga desa.

Selain itu, transparansi juga didukung oleh penggunaan media publikasi, baliho anggaran, laporan keuangan, dan platform digital seperti website atau media sosial. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa, sehingga mereka dapat memberikan masukan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Meski demikian, efektivitas pelaksanaan transparansi ini masih perlu terus ditingkatkan agar partisipasi dan pengawasan masyarakat berjalan lebih optimal.

SIMPULAN

Peran Pemerintah Desa Dungingis secara aktif dan komprehensif mendorong pembangunan ekonomi lokal dengan berbagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, penyediaan sarana produksi, serta sosialisasi dan promosi produk lokal. Pemerintah desa juga berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar untuk mengoptimalkan potensi desa. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terus dijaga melalui pertemuan rutin, publikasi informasi, dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Respons positif dari pelaku UMKM, nelayan, dan petani, Kolaborasi yang erat antara pemerintah desa, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan pembangunan ekonomi desa yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Desa Dungingis diharapkan memperkuat peran serta masyarakat melalui pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, serta meningkatkan kolaborasi dengan lembaga terkait guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Dungingis.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, A. (2019). Metode penelitian kualitatif: Sebagai upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu. Pt Rajagrfindo Persada.

Azam Awang. (2010). Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. *Cetakan I*. Yogyakarta *:* Pustaka Pelajar.

Fajarwati, A., Cikusin, Y., & Putra, L. R., F., A. ,. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan usaha burung walet dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, *7(1)*, 167–178.

Hardinata, D., & Mesra, R. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat pada sektor perikanan di desa mantang besar, kecamatan mantang, kabupaten bintan. *Etic (Education and Social Science Journal)*, *1(4)*, 253–265.

Moleong, Lexy. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Rivai, Veithzal. (2006). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta : *PT. Raja Grafindo Persada*.

Ryass, Rasyid. (2010). Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitan Kombinasi (mixed methods). Bandung: CV Alfabeta.

Suparmoko. (2019). Perekonomian Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.